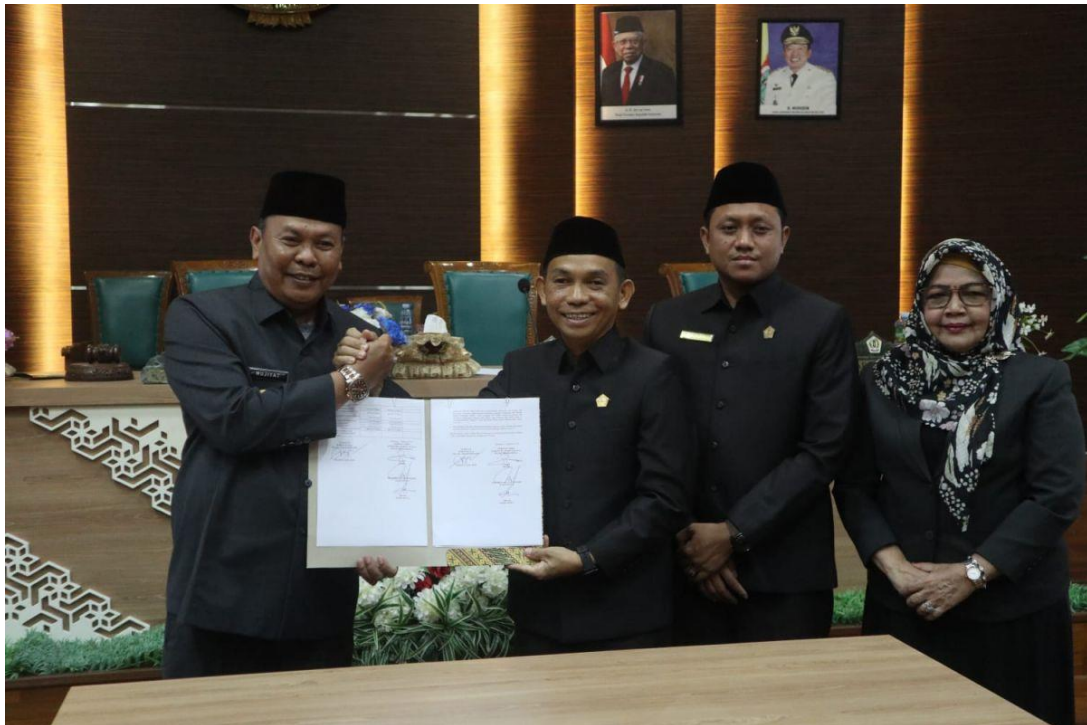


## **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Setujui Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batola 2023**



**Sumber gambar:**

<https://kalsel.antaranews.com/berita/386205/dprd-batola-setujui-raperda-perubahan-apbd-kabupaten-batola-2023>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (DPRD Batola) bersama Pemerintah Kabupaten (pemkab) Batola, Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Batola TA 2023 dan Penyampaian 4 (empat) buah Raperda.

Penjabat Bupati Batola Mujiyat mengatakan, ditandatanganinya persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023, maka DPRD dan pemerintah daerah pada hakekatnya mempunyai tanggung jawab sama melalui fungsi dan kewenangan masing-masing dalam mencapai keberhasilan pembangunan 2023.

Seiring dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah, maka dapat saya tegaskan, pemkab Batola dan DPRD telah setuju untuk melangkah bersama. Selain itu, sebut dia, meningkatkan dan menuntaskan seluruh rangkaian rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2023, utamanya diparuh waktu sampai akhir tahun.

Perwakilan Badan Anggaran APBD Batola Basrin mengatakan, beberapa poin berupa hasil pembahasan dan pembicaraan antara badan anggaran dan tim anggota Pemerintah Kabupaten Batola, diantaranya penggunaan anggaran untuk pembelian pick up untuk operasional tanggap darurat bencana.

Adanya pengurangan penambahan serta pergeseran anggaran ternyata tidak mengganggu kinerja SKPD dan pengurangan, penambahan atau perubahan pagu dapat digunakan untuk hal prioritas untuk kepentingan SKPD. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Batola Saleh didampingi Wakil Ketua M Agung Purnomo dan Arfah juga dihadiri Sekretaris Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para staf ahli, asisten, pimpinan SKPD, para camat, lurah dan seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu Pimpinan DPRD Barito Kuala dan Penjabat Bupati Batola melakukan penandatanganan berita acara surat persetujuan untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Kalsel.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/386205/dprd-batola-setujui-raperda-perubahan-apbd-kabupaten-batola-2023>, 11 Oktober 2023.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/09/07/dprd-batola-setujui-raperda-perubahan-apbd-2023-tim-banggar-bacakan-sejumlah-poin>, 11 Oktober 2023.

#### **Catatan Berita:**

#### **Pengaturan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003**

- 1) Pasal 31 ayat (1); Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penjelasan dari Pasal ini menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

- 2) Pasal 31 ayat (2); Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Dilanjutkan dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.

- 3) Pasal 32 ayat (1); Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

- 4) Pasal 32 ayat (2); Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Disampaikan lebih lanjut dalam bagian penjelasan apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.